

Judul : Marak kasus pelecehan, komisi III minta kampus aktifkan satgas PPKS
Tanggal : Kamis, 16 April 2026
Surat Kabar : Rakyat Merdeka
Halaman : 3

Marak Kasus Pelecehan Komisi III Minta Kampus Aktifkan Satgas PPKS

SENAYAN mendesak aparat berwenang mengusut tuntas kasus dugaan pelecehan seksual verbal yang melibatkan 16 mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Indonesia (FHUI). Kasus tersebut dinilai tidak hanya melanggar etika akademik, tetapi juga mencederai nilai kemanusiaan.

Anggota Komisi III DPR Lola Nelria Oktavia merasa prihatin dan mengecam keras tindakan tersebut. Para mahasiswa hukum yang merupakan calon penegak hukum, seharusnya menjunjung tinggi integritas, empati, dan penghormatan terhadap hak asasi manusia.

Dia bilang, kasus ini menjadi alarm penting bagi dunia pendidikan hukum. "Penanganan kasus ini harus dilakukan secara serius agar tidak menjadi preseden buruk di lingkungan akademik," tegas Lola di Jakarta, Rabu (15/4/2026).

Diketahui, kasus ini mencuat setelah 16 mahasiswa FHUI angkatan 2023 mengakui melakukan pelecehan seksual verbal terhadap mahasiswi dan juga dosen. Perbuatan itu dilakukan melalui percakapan di grup WhatsApp dan Line dengan pesan bernuansa seksual yang merendahkan.

Percakapan itu juga beredar di media sosial (medsos) X lewat unggahan akun @sampahfhui pada Sabtu (11/4/2026). Selanjutnya, permintaan maaf para pelaku disampaikan secara terbuka di grup angkatan pada akhir pekan lalu, sebelum akhirnya kasus tersebut viral di medsos.

Lola melanjutkan, proses internal melalui Satgas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (PPKS) UI perlu dihormati. Tapi, tetap ha-

rus berpihak pada korban dan menjunjung prinsip keadilan.

Karena itu, pihak kampus harus bertindak tegas dan transparan, termasuk dalam pemberian sanksi. Apabila ditemukan unsur pidana, kepolisian, khususnya unit yang menangani perempuan dan anak, perlu melakukan pengusutan secara menyeluruh. "Penegakan hukum yang tegas penting untuk mencegah terulangnya kasus serupa," tegasnya.

Selain itu, ia menyoroti perlunya penguatan sistem pencegahan kekerasan seksual di kampus. Caranya melalui pendidikan etika, peningkatan kesadaran gender, dan mekanisme pengawasan yang lebih responsif.

Senada, anggota Komisi X DPR Habib Syarief Muhammad mendesak Kementerian Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi (Kemendiktisaintek) melakukan langkah terobosan agar kekerasan seksual di lingkungan kampus tidak terus berulang. Semua pihak tidak boleh ada toleransi terhadap pelaku kekerasan seksual di kampus.

"Tindakan tegas harus diambil Kemendiktisaintek, termasuk pemberhentian sebagai mahasiswa, agar memberikan efek jera dan menjadi peringatan bagi yang lain," ujarnya di Jakarta, Rabu (15/4/2026).

Habib menegaskan, kekerasan seksual di kampus merupakan pelanggaran serius terhadap nilai-nilai kemanusiaan dan dunia pendidikan. Lembaga pendidikan seharusnya menjadi penyemaian nilai-nilai penghormatan terhadap hubungan antarlawan jenis yang setara dan beradab. ■ TIF